

ABSTRAK

- (A) Nama : Bella Alimi
(B) NPM : 217182020
(C) Program Studi : Magister Kenotariatan
(D) Judul : Pembebasan Hak Atas Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 525/Pdt.G/2019/Pn.Tng).

Tanah bernilai penting dalam kehidupan bahkan bernegara termasuk di Indonesia dan menjadi modal yang berkaitan dengan hajat hidup banyak orang sehingga peranan kepemilikan tanah terdapat fungsi sosial dalam pembangunan untuk kepentingan umum menjadi menarik diteliti bagaimana mekanisme pembebasan dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum mengapa sampai ada perbuatan melawan hukum yang melanggar hak seorang warga negara sementara tujuan pembangunan itu sendiri adalah untuk kepentingan umum untuk kemakmuran rakyat bagaimana bisa kemakmuran seluruh rakyat dilakukan diatas penderitaan salah satu warganya dalam Pelaksanaannya kemudian tindakan dan proses-proses perlindungan hukum seperti apa yang ada terhadap masyarakat menjadi penelitian tesis 'Pembebasan Hak Atas Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum' Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 525/Pdt.G/2019/Pn.Tng).

Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian normatif yang meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingannya didukung metode penelitian hukum empiris untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata kemudian data penelitian hukum dianalisis dengan teori dari pada tujuan dari hukum kemanfaat, keadilan, kepastian sampai dengan perlindungan hukum.

Jawaban penelitian. Mekanisme Pembebasan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dengan beberapa tahapan diantaranya mengadakan pendekatan-pendekatan untuk memberikan penjelasan-penjelasan tata cara pembebasan sampai penggunaan tanah setelah dibebaskan juga berkenaan ganti kerugian disertai langkah proses surat-surat peralihan disinilah Surat pelepasan tanah dirujuk dari perjanjian yang telah disepakati masyarakat sampai akhir selesai proses ganti rugi dari pihak pemerintah yang melaksanakan pembebasan untuk pemnaguna kepentingan umum tersebut. Perlindungan Hukum melalui jalur litigasi masyarakat sebagaimanana putusan 525/Pdt.G/2019/Pn.Tng dapat mengungkap fakta kebenaran dan sudah seharusnya Saudara Saw The Nji sebagai pemilik tanah dapat kembali memperoleh dan memanfaatkan tanahnya.

Saran dari penulis kepada Pemerintah langkah pembebasan hak bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum selalu melakukan prinsip kehati-hatian khususnya bagian keperdataan dan administrasi agar pangadaan tanah betul-betul manfaat menerapkan keadilan, kepastian hukum bagi semuanya kepada masyarakat perlindungan hukum itu tidak serta merta terwujud maka daftarkan hak atas nya ke Kantor Pertanahan menjadikan kepastian data fisik dan data yuridis di kantor pertanahan bahkan membantu pemerintah mendata secara valid kepemilikan tanahnya.

- (E) **Keyword:** Pembangunan, Kepentingan, Umum

ABSTRACT

- (A) *Name* : Bella Alimi
(B) *Student Number* : 217182020
(C) *Program* : Magister Kenotariatan
(D) *Title* : *The Liberation Of Land Development Implementation For Public Interest In Indonesia (Case Study of Decision Number 525/Pdt.G/2019/Pn.Tng)*

Land is important thing in life and also country including Indonesia. And it is a modal that related with people's life so there is function of the role of land ownership in development for public interest become interesting to be researched. How is the mechanism of the liberation in development implementation for public interest. Why there is an act against the law that violate the rights of public meanwhile the aim of development itself is for public interest for prosperity public. How can the public prosperity are done on the suffering one of the public so, what is the kind of the implementation, the act and processes of legal protection towards the public become the research of this thesis with the title The Liberation of Land for Development Implementation for Public Interest in Indonesia (A Case Study of Decision Number 525/Pdt.G/2019/PN.Tng).

The method that used is normative law, that is normative law that research legal principle, legal systematics, legal history research and the research comparison is supported by empirical research method to be able to see the law in the real meaning. Then the legal research data was analyzed with theory of the aim from the legal benefit, justice, certainty and also the legal protection.

The result of the research is the mechanism of the liberation of land for development implementation for public interest with some of the steps are take approaches for giving explanations of the steps of the liberation until the using of the land. After the liberation also regarding compensation that accompanied the process of transition letters. Here it is the land release letter was referenced from the agreement that already agreed by the public until the end of the process compensation from the government that done the liberation for the development of public interest itself. Legal protection through the public litigation according to decision 525/Pdt.G/2019/Pn.Tng could reveal the truth and Mr. Saw The Nji as the owner of the land could get back and utilized his land.

Suggestion from the researcher for the government is the steps for the legal of liberation for development of public interest should use precautionary principle, especially for administrative so the land acquisition is really useful in applying the fairness. The legal certainty for public did not happen immediately, so the public should registered to Land Office (BPN), make sure the physical data and juridical data at Land Office, even it could help the government register validity the owner of the land.

(E) Keyword: Development, Interest, Public.